

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan anak (*delinkuensi*) dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Spesifikasi kejahatan anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah kejahatan anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat¹

Kejahatan anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek kejahatan anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi *resultante* dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana².

Bentuk kejahatan anak sudah semakin terstruktur dan pada

¹ Maulana Hasan Wadong; *Pengantar Advokasi dan Hulaim Perlindungan Anak*; Gramedia; Jakarta, 2000; hat 8

² *Ibid*, Hal. 82. '

nuansa kejahatan yang berkembang dan berteknologi dan menjururs pada kejahatankejahatan politik yang kasualistis. Kejahatan anak yang demikian harus meletakkan subjek anak sebagai pelaku kejahatan dan anak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkannya tindakan-tindakan perbuatan yang menimbulkan kejahatan anak itu menjadi sah.³

Beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak terlantar secara fisik atau mental, faktor pergaulan/tingkungan, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, semua itu telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak . Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan saksama melalui suatu sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas,⁴ yang terdiri dari : Substansi Hukum (*legal substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang pengadilan anak, struktur hukum (*legal structure*) menyangkut

³*Ibid*, Hal. 83

⁴ Surnaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni 1991, Bandung, hal. 56.

Badan/Lembaga yang menangani pengadilan anak, terdiri dari Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain dan yang terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*) yaitu berkaitan dengan persepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat

Faktor lain yang dapat pula menjadi pencetus kenakalan anak adalah kebutuhan hidup yang sangat mendesak, perbuatan orang lain yang menyakiti harga diri, perbuatan untuk mempertahankan diri, tidak adanya pengakuan atau penghargaan, pengaruh orang lain atau tekanan psikis yang memaksa; dan problema sosial, yaitu faktor fisik yang menyangkut energi yang berlebih, faktor biologis yang bersumber dari keturunan, faktor psikis berkaitan dengan kepribadian dan kemampuan intelektual, faktor sosial yang menyangkut ketidakserasian dengan lingkungan, faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, faktor spiritual yang berkaitan dengan bimbingan agama, faktor pengaruh media massa.

Faktor-faktor seperti yang telah disebutkan diatas dapat menyebabkan kenakalan anak yang berikut seperti :

1. Lingkungan keluarga : lari dari rumah
2. Lingkungan sekolah : bolos, melawan guru
3. Lingkungan masyarakat : mengganggu orang lain, penganiayaan
(Pasal 351-355 KUHPidana), mabuk di tempat umum, pemerasan (Pasal

368 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tawuran yang mengakibatkan luka atau mati (Pasal 170 dan Pasal 338 KUHP), penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976).⁵

Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus kriminal yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam kasus kriminal terpaksa harus berhadapan dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Saat ini muncul kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah kasus ABH. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2011 hingga sekarang, Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada di posisi puncak data anak terjerat masalah hukum. Menyingkirkan masalah-masalah lain yang kerap terjadi pada anak. Tak tanggung-tanggung, ribuan anak tercatat masuk sebagai ABH. Dari tabulasi bank data kasus perlindungan anak yang dimiliki KPAI, dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132 ABH. Terpampang, dari tahun 2011 hingga 2014, data anak yang tersangkut masalah hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi terus menanjak. Namun pada tahun 2015 dan 2016, angkanya menurun. Jenis ABH ini masih dibagi tiga, yakni ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban dan ABH sebagai saksi. Mirisnya, ABH sebagai korban lebih banyak dari dua jenis ABH yang lain. Rinciannya, ABH

⁵ *Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 36.

sebagai korban sebanyak 4.086 pengaduan, ABH sebagai pelaku sebanyak 3.010 dan ABH sebagai saksi 36 laporan.

Posisi kedua anak yang terseret masalah menyangkut kasus keluarga dan pengasuhan alternatif yakni sebanyak 3.875 laporan. Berikutnya sektor pendidikan sebanyak 2.252 laporan kasus. Kemudian, kesehatan dan napza sebanyak 1.706 kasus. Lalu, pornografi dan cyber crime sebanyak 1.462 kasus. Posisi berikutnya adalah trafficking dan eksploitasi sebanyak 1.158 kasus. Lalu, sektor agama dan budaya, sebanyak 832 kasus anak. Di bawahnya adalah sektor sosial dan anak dalam situasi darurat yakni sebanyak 806 kasus. Data anak sebagai korban kelalaian orang tua atau lingkungan sebanyak 439 kasus. Dan terakhir terkait hak sipil dan partisipasi sebanyak 359 kasus⁶

No	Jenis	Jumlah
1	Anak Berhadapan Hukum	7.132
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	3.875
3	Pendidikan	2.252
4	Kesehatan dan Napza	1.706
5	Pornografi dan Cyber Crime	1.462
6	Trafficking dan Eksploitasi	1.158
7	Agama dan Budaya	832
8	Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat	806
9	Hak Sipil dan Partisipasi	359

Sumber: KPAI

Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas terkadang harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan

⁶ Dilema Anak Berhadapan Hukum dengan Penerapan UU SPPA Dari tahun 2011 hingga sekarang, Anak Berhadapan Hukum dominasi laporan yang masuk ke KPAI, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579220ac6fafc/dilema-anak-berhadapan-hukum-dengan-penerapan-uu-sppa> diakses 18 Oktober 2017

(pencabutan kemerdekaan). Aparat penegak hukum jarang menggunakan jalur selain jalur hukum yang berujung pada pemidanaan.

Proses hukum ABH dimulai dari tingkat kepolisian. Di tingkat kepolisian, ABH menjalani pemeriksaan atas kasus kriminal yang melibatkan dirinya. Setelah melalui tingkat kepolisian, ABH harus menjalani proses hukum berikutnya di tingkat kejaksaan, hingga akhirnya ke tingkat penuntutan di pengadilan.

Upaya-upaya yang telah diusahakan pemerintah dalam menanggulangi kenakalan anak adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana tujuan dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat preventif, sehingga diharapkan tingkat kenakalan anak akan semakin menurun. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut tetap saja tidak dapat menekan tingkat kenakalan anak. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan pada konsideran UU tersebut bahwa yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang tersebut adalah :

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan

- pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atas pemikiran tersebut dan ditambah pula dengan kenyataan bahwa di Indonesia belum terdapat suatu forum khusus yang menangani Pengadilan Anak, sehingga menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar, maka sering terjadi pidana anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa" sehingga seluruh proses perkaranya diperlakukan sama dengan penanganan terhadap orang dewasa, misalnya anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa, padahal, anak-anak bukanlah

orang dewasa dalam bentuk kecil.⁷ Begitu pula dengan masa penahanannya tanpa ada perlakuan yang khusus. Hal ini dapat menimbulkan perkembangan tingkah laku yang menyimpang dan perkembangan kejiwaan yang tidak sehat pada anak.

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas, sesungguhnya tampak jelas bahwa kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik daripada yang terdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena kasus tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diharapkan petugas yang menangani perkara, dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana juga berlaku untuk anak dengan penambahan dan penyesuaian. Sistem Peradilan Pidana Anak harus didasarkan pada beberapa asas dasar peradilan pidana yaitu: *equality before the law* (Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak); *due process of law, simplicity and expediency, accountability, legality principle presumption of innocent* (Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak-hak Anak). Hal lain

⁷ Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

yang perlu diperhatikan adalah penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak merupakan jalan lain terakhir (Pasal 3 huruf b).

Agar tidak menambah panjang deretan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu adanya sanksi yang tegas, baik berupa pidana Maupun tindakan, sehingga dapat menjerakan Serta dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa mengurangi atau mengabaikan kedudukan dan hak-haknya sebagai seorang anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas agar di kemudian hari is tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diusahakan agar anak tersebut jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hal itu memang harus terjadi, maka harus dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi rohani maupun jasmaninya yang memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak, jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi harus juga ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan harus juga ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka dikemudian hari tidak menjadi

korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Segala upaya telah diusahakan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak benar-benar tidak merugikan anak yang terkena kasus. Salah satu contoh seperti diaturnya suatu peraturan khusus mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 (Pasal 71 ayat 1 dan 2) terdiri dari :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

⁸ Iskandar Kamil, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 1 Juni 2005, hlm. 5

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan-tindakan dimaksud diharapkan dapat mendidik para anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar lebih memiliki kesiapan bagi dirinya kelak, membentuk tingkah laku yang tidak menyimpang, untuk lebih mengembangkan atau menyalurkan minat dan bakatnya agar pengembangan kejiwaannya tidak terganggu, dan juga dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda, sehingga undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kenakalan anak.

Penerapan pidana (sanksi) yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.⁹ Demikian halnya dengan sanksi yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa anak akan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Bahkan disparitas pidana dapat terjadi dalam perkara atau tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa anak.

Sebagaimana dalam persidangan hakim diharuskan untuk tidak memihak dan bersifat bebas termasuk dalam memberikan sanksi kepada anak

⁹ M Sholehuddin; *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada; Jakarta; 2003; Hal. 56.

yang melakukan tindak pidana hendaknya harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Hakim dalam memberikan sanksi harus mendasarkan pada pertimbangan yang cukup dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut diperoleh melalui proses pembuktian di sidang pengadilan melalui alat-alat bukti yang sah yang ditentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

Apabila dicermati dari beberapa putusan pengadilan di masyarakat selama ini maka setiap satu putusan dengan putusan yang lainnya itu tidak ada yang sama persis, artinya selalu terdapat perbedaan meskipun perbedaan itu sedikit sekali. Hal ini dikarenakan setiap putusan memiliki karakter dan ciri tersendiri yang merupakan cerminan dari subjektivitas masing-masing hakim sebagai manusia individu yang selalu berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan perbedaan ini selalu dapat ditemukan dalam putusan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meski hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Akan tetapi sifat subjektif daripada hakim sebagai individu selalu ada dalam diri masing-masing hakim.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice*

(keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "*Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)*".¹⁰ Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,¹¹ yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7

¹¹ DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*. Artikel tidak diterbitkan, hal. 1

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 98

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hingga Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak⁸¹³.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹³ Institute for Criminal Justice Reform, "Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Institute for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> (diakses 18 Oktober 2017).

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang

dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁴

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengetahui realitas kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang serta mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana dan Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi terhadap

¹⁴ Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011), hal. 8-9

penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk diajukan beberapa permasalahan, antara lain:

- A. Apakah Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Sudah mencerminkan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ?
- B. Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Sudah mencerminkan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ;
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai wacana kajian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terhadap anak, khususnya hukum pidana yang

mencerminkan nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong royong.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian / pertimbangan bagi hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ;.

b) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini menjadi kontribusi yang bermanfaat teratarna dalam kerangka pengetahuan, pemahaman dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk Baling menghormati hak-hak anak korelasinya dengan rasa kemanusiaan.

c) Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

E. Kgunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan bagi penentu kebijakan atau pelaksana kebijakan adalah agar para praktisi hukum dapat memahami dan mempedomani setiap peraturan dan teori serta pemikiran para pemerhati anak dalam fenomena sosial. Sehingga dapat saling bekerjasama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak.

2) Kegunaan bagi pengembang ilmu hukum, diharapkan akan menghasilkan suatu sumbangan pemikiran baru terhadap berjalannya suatu sistem peradilan agar tercapainya suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang dapat menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto," Penelitian adalah kegiatan yang hati-hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia".¹⁵

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan :

"Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan".¹⁶

1. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1990, hal.5.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal.84.

bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis¹⁷ maupun hukum yang tidak tertulis¹⁸ atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan sosiologis (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dengan maksud atau bertujuan untuk meneliti dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak Nakal dan menilai apakah putusan yang dijatuhkan berupa Sanksi (Pidana/Tindakan) Sudah mencerminkan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dan Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Malang.

¹⁷ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas

¹⁸ Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian sengaja dipilih Pengadilan Negeri Malang, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Malang menangani kasus yang dilakukan oleh anak dengan jumlah terbesar ketiga setelah Surabaya dan Blitar.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Surat Kabar, majalah, Jurnal Penelitian, Internet, Perpustakaan Kota Malang.

4. Teknik Memperoleh Data

¹⁹ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, 1997, Hal.99.

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui

1) Observasi (langsung)

Observasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

2) Interview guide

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), yang berisi pokok-pokok yang ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya kepada responder yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri Malang, mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau literatur, penelusuran interriat, artikel, peraturan perundang-undangan Serta

dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang terkait.

5. **Spesifikasi Penelitian.**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Malang.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, berdasarkan pada tujuan tertentu tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

6. **Metode Analisa Data.**

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisa dilakukan dengan cara setiap data yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder kemudian diseleksi untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif

²⁰ Bambang Sunggono; *Metode Penelitian Hukum*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2003; Hal. 121.

²¹ *Ibid.*

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan merupakan hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam 4 (empat) Bab, dimana tiap Bab terbagi menjadi sub bab-sub bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup dan pembatasan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Secara garis besar dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian anak nakal, kenakalan anak, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, batas usia pemidanaan anak, jenis-jenis sanksi terhadap anak nakal, persidangan anak dan pemberian sanksi terhadap anak, Pengertian Restoratis Justice dan Diversi.

Bab III merupakan hasil penelitian serta pembahasannya. Data yang terkumpul merupakan hasil temuan di lapangan akan disusun dan diteliti sehingga memperoleh fakta, yang kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam Bab III ini terbagi atas 3 sub bab yaitu:

- a. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak nakal.
- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana daripada sanksi berupa pidana atau tindakan;

- c. penerapan *restorative justice* melalui sistem diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Malang

Bab IV adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi yang berkepentingan.

